

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kerja sama *sister city* Jakarta-Berlin menunjukkan bahwa paradiplomasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berkembang menuju bentuk hubungan internasional pemerintah daerah yang semakin terinstitusionalisasi. Proses institusionalisasi tersebut terlihat melalui keberadaan perangkat kelembagaan seperti Biro Kerja Sama Daerah (BKD), keberlanjutan hubungan formal sejak penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* tahun 1994, keterlibatan dalam berbagai forum internasional, serta berkembangnya kolaborasi multistakeholder melalui program seperti *Smart Change* dan *AsiaBerlin*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan Jakarta-Berlin tidak lagi bersifat simbolik atau seremonial semata, tetapi telah berkembang menjadi kerja sama jangka panjang yang mencakup sektor inovasi, pembangunan kota, ekonomi digital, dan jejaring global.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perkembangan paradiplomasi Jakarta-Berlin mengalami transformasi dari pola kerja sama administratif konvensional menuju model kolaboratif berbasis jejaring internasional dan ekonomi inovasi. Melalui platform seperti *AsiaBerlin*, hubungan kedua kota tidak hanya dijalankan oleh pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan komunitas startup, lembaga pembangunan internasional, investor, sektor swasta, dan berbagai aktor non-negara lainnya. Hal tersebut memperlihatkan bahwa

paradiplomasi modern semakin berkembang ke arah *network governance* dan kolaborasi multistakeholder dalam menghadapi tantangan pembangunan perkotaan kontemporer.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa hubungan Jakarta-Berlin dalam praktiknya tidak sepenuhnya berjalan dalam posisi yang setara. Berlin memiliki kapasitas paradiplomasi yang lebih kuat karena didukung fleksibilitas kelembagaan, sistem federal Jerman, jejaring internasional yang lebih mapan, serta posisi sebagai salah satu pusat inovasi dan startup global di Eropa. Sebaliknya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menghadapi berbagai keterbatasan struktural yang memengaruhi posisi dan kapasitas paradiplomasi dalam jejaring global. Dalam berbagai program seperti AsiaBerlin dan *Smart Change*, Berlin cenderung berperan sebagai aktor utama yang membangun, mengarahkan, dan mengendalikan jejaring internasional, sementara Jakarta lebih banyak berada pada posisi sebagai pihak yang mengakses dan memanfaatkan konektivitas global yang telah dibentuk oleh Berlin.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keterbatasan paradiplomasi Jakarta tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kapasitas ekonomi dan internasionalisasi kota, tetapi juga oleh struktur birokrasi dan regulasi nasional Indonesia yang relatif sentralistis. Berbagai bentuk kerja sama internasional pemerintah daerah masih harus melalui koordinasi administratif dengan pemerintah pusat sehingga ruang gerak paradiplomasi Jakarta menjadi kurang fleksibel dibanding Berlin. Akibatnya, paradiplomasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cenderung berkembang secara administratif dan koordinatif, tetapi belum

seungguhnya mampu berkembang menjadi diplomasi kota yang strategis, otonom, dan kompetitif di tingkat global.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa institusionalisasi paradiplomasi Jakarta-Berlin memang berhasil memperkuat hubungan internasional pemerintah daerah dan memperluas keterlibatan Jakarta dalam jejaring global. Akan tetapi, hubungan tersebut juga memperlihatkan adanya ketimpangan kapasitas dan distribusi pengaruh antara kota global di negara maju dan pemerintah daerah di negara berkembang. Dalam konteks ini, hubungan Jakarta-Berlin tidak hanya mencerminkan keberhasilan paradiplomasi pemerintah daerah, tetapi juga menunjukkan bagaimana hierarki kota global tetap memengaruhi pola hubungan, posisi tawar, dan kapasitas aktor subnasional dalam dinamika hubungan internasional kontemporer.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memperkuat kapasitas paradiplomasi yang tidak hanya berorientasi pada kerja sama administratif, tetapi juga mampu membangun diplomasi ekonomi kota yang lebih strategis dan kompetitif. Selama ini, keterlibatan Jakarta dalam berbagai jejaring internasional masih cenderung bergantung pada fasilitasi dan konektivitas global yang dibangun pihak eksternal seperti Berlin dan lembaga internasional Jerman. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu mulai mengembangkan agenda internasional yang lebih mandiri melalui penguatan

jejaring startup, inovasi perkotaan, dan diplomasi ekonomi yang dapat meningkatkan posisi tawar Jakarta dalam jejaring kota global.

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga perlu memperkuat kapasitas kelembagaan paradiplomasi melalui peningkatan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas diplomasi internasional, serta pembentukan strategi internasionalisasi kota yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Langkah tersebut penting agar paradiplomasi Jakarta tidak hanya berkembang sebagai aktivitas seremonial atau administratif, tetapi mampu menjadi instrumen strategis dalam memperluas pengaruh dan konektivitas internasional kota.

Bagi pemerintah pusat, penelitian ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap regulasi dan mekanisme kerja sama luar negeri pemerintah daerah di Indonesia. Struktur birokrasi yang relatif sentralistis menyebabkan ruang gerak paradiplomasi pemerintah daerah menjadi kurang fleksibel dibanding kota global seperti Berlin. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu memberikan ruang yang lebih adaptif bagi pemerintah daerah untuk membangun kerja sama internasional, khususnya dalam sektor inovasi, ekonomi digital, dan pembangunan kota. Penyederhanaan proses birokrasi dan penguatan fleksibilitas regulasi menjadi penting agar pemerintah daerah mampu merespons dinamika jejaring global secara lebih cepat dan strategis.

Selain itu, pemerintah pusat juga perlu mulai memandang paradiplomasi pemerintah daerah bukan hanya sebagai aktivitas administratif, tetapi sebagai instrumen yang dapat mendukung kepentingan nasional melalui penguatan

diplomasi ekonomi, investasi, dan jejaring internasional di tingkat subnasional. Dengan demikian, hubungan internasional pemerintah daerah dapat berkembang secara lebih optimal tanpa kehilangan sinkronisasi dengan kebijakan luar negeri nasional.

Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena berfokus pada satu studi kasus kerja sama *sister city* Jakarta-Berlin. Oleh karena itu, penelitian berikutnya dapat mengembangkan kajian komparatif dengan hubungan *sister city* lain di Indonesia maupun negara berkembang lainnya untuk melihat perbedaan kapasitas paradiplomasi, pola jejaring global, dan pengaruh struktur negara terhadap perkembangan diplomasi pemerintah daerah. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat memperdalam kajian mengenai diplomasi ekonomi kota, *global city networking*, dan ketimpangan kapasitas antar kota dalam praktik paradiplomasi kontemporer.